



LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun 2022

LURAH NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLANGGERAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022-2027 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Nglanggeran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Nglanggeran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Kalurahan , Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN
DAN
LURAH NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Nglanggeran.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Nglanggeran sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Nglanggeran perangkat Kalurahan Nglanggeran sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan .
5. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan Nglanggeran yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Kalurahan Nglanggeran dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah Nglanggeran dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan , dan unsur pendukung tugas Lurah Nglanggeran dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh

- Pemerintah Kalurahan dan **BAMUSKAL**, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan .
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut.
 10. Lembaga Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
 11. Musyawarah Kalurahan (Musdes) adalah musyawarah antara **Bamuskal**, Pemerintah Kalurahan , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh **Bamuskal** untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan).
 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
 13. Pembangunan Kalurahan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
 14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
 15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
 16. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di Kalurahan guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu Kalurahan dalam jangka waktu tertentu.
 17. RPJMKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Kepala Kalurahan , yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan , arah keuangan Kalurahan , kebijakan umum dan program kegiatan.
 18. RPKKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan , dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan .
 19. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan .
 20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMKal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat;

21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kalurahan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat Kalurahan agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif;
22. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan .
23. Badan Usaha Milik Kalurahan , yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan .
24. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan , dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Kalurahan yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM- Kalurahan) Nglanggeran Tahun 2022-2027 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJM- Kalurahan ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kalurahan) dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan (Perkal)

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kalurahan , Lurah yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kalurahan) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP- Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kalurahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB- Kalurahan) tahun pertama periode pemerintahan Lurah berikutnya.

- (3) Masa pemerintahan Lurah setelah tahun 2026 berkewajiban untuk menyusun RPJM- Kalurahan periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 15 Maret 2022
LURAH NGLANGGERAN,

ttd

WIDADA

Diundangkan di Nglanggeran
pada tanggal 15 Maret 2022
CARIK NGLANGGERAN,

ttd

RUSMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN TAHUN 2022 NOMOR 4

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	9
A.	Latar Belakang	9
B.	Maksud dan Tujuan	9
C.	Hubungan RPJM- Kalurahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
D.	Sistematik Penulisan RPJM- KALURAHAN	10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN	12
A.	Kondisi Geografi	12
B.	Perekonomian Kalurahan	13
C.	Sosial Budaya Kalurahan	14
D.	Prasarana dan Sarana Kalurahan	23
BAB III	VISI DAN MISI	24
A.	Filosofi	24
B.	Visi	25
C.	Misi	25
BAB IV	POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	29
A.	Potensi	29
B.	Masalah	35
C.	Strategi	38
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	41
A.	Arah Pengelolaan Keuangan Kalurahan	41
B.	Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	43
A.	Strategi Kebijakan	43
B.	Program dan Kegiatan Pembangunan	45
BAB VII	PENUTUP	46
A.	Program	46
B.	Kaidah Pelaksanaan	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai data perencanaan 6 (enam) tahunan, RPJM- Kalurahan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Kalurahan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Kalurahan perlu menyusun data rencana pembangunan jangka menengah. Dalam Penyusunan data perencanaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan , bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan keterpaduan antara pembangunan di Kalurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 yang berfungsi sebagai data perencanaan periode 6 (enam) tahun periode jabatan Kepala Kalurahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan , disebutkan pula bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu disusun perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai satu kesatuan yang menjadi arah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan Kalurahan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM- Kalurahan) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan. RKP- Kalurahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM- Kalurahan) dengan memuat indikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APB Kalurahan , APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, atau swadaya serta pembiayaan lainya seperti hibah dan program lain.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM-Kalurahan ialah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keselarasan serta menyelaraskan program-program pembangunan di Kalurahan , sedangkan tujuan penyusunan RPJM-Kalurahan adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menentukan pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan secara berkala;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan , APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya;
3. Menyajikan gambaran kondisi umum Kalurahan sekarang serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan ;
4. Memudahkan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara tepat, terarah dan terukur.

C. Hubungan RPJM- KALURAHAN dengan Dokumem Perencanaan Lainnya

1. Hubungan RPJM- KALURAHAN dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

RPJM- KALURAHAN Nglanggeran ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Hubungan RPJM- Kalurahan dengan RKP- Kalurahan

Data RPJM- Kalurahan yang disusun untuk perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2022 – 2027, ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kalurahan) setiap tahunnya. Apabila suatu program pembangunan belum bisa terlaksana pada tahun pertama maka untuk tahun berikutnya terus diprogramkan hingga terealisasi. Dengan RPJM- Kalurahan ini pula arah pembangunan untuk setiap tahunnya menjadi pasti. Begitu pula angka sumber pembiayaan dapat diarahkan untuk terlaksananya rencana pembangunan tersebut secara lebih tepat dan efisien.

3. Sistematika Penulisan RPJM- Kalurahan

Sistematika penulisan RPJM- Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hubungan RPJM- Kalurahan dengan data Perencanaan lainnya

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

- A. Kondisi Geografi
- B. Perekonomian Kalurahan
- C. Sosial Budaya Kalurahan
- D. Prasarana dan Sarana Kalurahan

BAB III VISI DAN MISI

- A. Filosofi
- B. Visi
- C. Misi

BAB IV POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Potensi
- B. Masalah
- C. Strategi

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Arah Pengelolaan Keuangan Kalurahan
- B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- A. Strategi Kebijakan
- B. Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB VII PENUTUP

- A. Program
- B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

A. Kondisi Geografi

Kalurahan Nglanggeran adalah salah satu Kalurahan yang secara administratif berada di Wilayah Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalurahan Nglanggeran terletak disebelah Timur Kota Kapanewon Patuk dengan luas wilayah 762,80 ha, jarak Kalurahan Nglanggeran dengan ibukota Kapanewon kurang lebih 4 km. dan 25 km dari ibukota Kabupaten Gunungkidul.

PETA WILAYAH



Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kalurahan Ngoro-oro dan Terbah
- Sebelah Selatan : Kalurahan Putat
- Sebelah Barat : Kalurahan Salam
- Sebelah Timur : Kalurahan Nglegi

Kondisi topografis Kalurahan Nglanggeran secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Ketinggian tanah 700 m di atas permukaan laut.
- Kondisi tanah adalah lereng berbukit-bukit dengan jenis tanah
- Banyaknya curah hujan per tahun 7,762 mm/tahun dengan jumlah rata-rata 80 hari; bulan basah berkisar antara 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan; musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober – Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya; puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Pebruari.
- Jumlah sungai di Kalurahan Nglanggeran ada 2 buah yang berada di Padukuhan Karangsari dan Nglanggeran wetan

B. Perekonomian Kalurahan

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Nglanggeran cukup beragam, mulai dari tanah persawahan hingga perbukitan dengan

segala kekayaan alamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Nglanggeran adalah sebagian besar lahan kering tadah hujan (95 %) yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif kecil dan sebagian besar sawah tadah hujan. Adapun rincian lahan pertanian Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Luas (ha)
1	Sawah tadah hujan	62.67 ha
2	Ladang tegalan	110.36 ha
3	Pekarangan	48.17 ha
4	Hutan milik warga masyarakat	268.25 ha
5	Perikanan	0
6	Tanah kritis/tandus	0

Lahan sawah yang dapat ditanami padi 2 kali dalam satu tahun adalah seluas kurang lebih 62.67 ha. Lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani padi-pala wija dengan pola tumpang sari.

2. Hutan

Hutan rakyat di Kalurahan Nglanggeran seluas kurang lebih 268.25 ha yang berfungsi sebagai hutan Konservasi 68.00 ha dan hutan rakyat 200.25 ha .

3. Flora dan fauna

Flora dan fauna yang ada di Wilayah Kalurahan Nglanggeran cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan.

Flora yang dapat dijumpai di Wilayah Kalurahan Nglanggeran dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Tanaman musiman antara lain meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan bermacam-macam polo pendem), serta sayur-sayuran (bayam, lombok, tomat dsb). Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, pisang, durian, rambutan, mangga, kelapa dan kakao) serta kayu-kayuan (jati, sono keling, mahoni, sengan laut, sengan jowo dan bambu).

Fauna darat dan udara yang ada di Wilayah Kalurahan Nglanggeran pada saat ini antara lain burung emprit, kutilang, ayam, ular dsb)

Fauna air yang ada adalah lele, wader, Nila, dsb. Selain itu terdapat jenis populasi ternak yaitu sapi potong kurang lebih 112 ekor, ayam kampung kurang lebih 4.500 ekor, Ayam Broiler 4.000 ekor, Ayam petelur 2.000 ekor, Ayam hias 55 ekor, bebek 25 ekor, mentok 100 ekor, kambing kurang lebih 99 ekor, Puyuh petelur kurang lebih 3.000 ekor.

4. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah yang ada di Wilayah Kalurahan Nglanggeran kurang lebih 153 pelaku usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari kelompok dan individu. Jenis usahanya terdiri dari pengolahan kayu, bambu, kerajinan batik, konfeksi dan makanan olahan. Industri mikro kecil dan menengah ini berbasis pada hasil pertanian, Perkebunan dan hasil hutan.

C. Sosial Budaya Kalurahan

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kalurahan Nglanggeran pada akhir tahun 2021 adalah 2.709 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 876 KK. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, penduduk Kalurahan Nglanggeran menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	1.343
2	Perempuan	1.366
	Jumlah	2.709

Data penduduk berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut :

No	Padukuhan	0-5 Tahun	6-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	< 18 Tahun	Jumlah
1	Karangsari	55	58	32	33	592	770
2	Doga	48	51	22	18	456	595
3	Nglanggeran Kulon	32	44	29	20	344	469
4	Nglanggeran Wetan	27	35	17	9	311	399
5	Gunungbutak	39	46	19	14	363	481
	JUMLAH	201	234	208	94	2066	2714

Data tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun **2021** di Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut:

No	Pedukuhan	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra PKS	KS I	KS II	KS III	KS Plus III	
1	Karangsari	12	65	77	76	30	260
2	Doga	11	68	74	41	11	203
3	Nglanggeran Kulon	8	56	38	42	14	155
4	Nglanggeran Wetan	6	31	43	32	12	124
5	Gunungbutak	8	61	32	40	11	152
	JUMLAH	45	281	264	231	78	

2. Pemerintahan Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (**BAMUSKAL**).

Pemerintah Kalurahan dikepalai oleh Lurah dan dibantu oleh Perangkat Kalurahan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari : 1 Sekretariat Kalurahan 3 Kepala Seksi, 3 Kepala Urusan 5 Dukuh dan 2 Staf Perangkat Kalurahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perangkat	Jabatan	Pendidikan
1	WIDADA	Lurah	SLTA
2	RUSMIYATI	Carik	Diploma III
3	NUR IKSAN	Jogoboyo	SLTA
4	TRİYANTA	Ulu-ulu	SLTA
5	ANWAROHMAN	Kamituwo	SLTA
6	SUPRATMIYATI	Tata laksana	SLTA
7	LASTRI WAHYUNI	Danarta	SLTA
8	PURWANINGSIH	Pangripto	SLTA
9	RINA SULISTYAWATI	Dukuh Karang Sari	SLTA
10	SUHARNO	Dukuh Doga	SLTA
11	WAHYU SETIYAWAN	Dukuh Nglanggeran Kulon	SLTA
12	AGUS	Dukuh Nglanggeran Wetan	SLTA
13	WIRAT	Dukuh Gunungbutak	SLTA
14	SUPARNA	Staf Pamong	SLTA
15	SUMARNI	Staf Pamong	S1

Unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 2 Kepala Bidang (Kabid) dan 2 anggota. Susunan Bamuskal Nglanggeran adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	Ponijo	Ketua	Wilayah 1
2	Samidi	Wakil Ketua	Wilayah IV
3	Triyana	Sekretaris	Wilayah II
4	Sutikno	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah VI
5	Sugiyanti	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyaratan	Keterwakilan Unsur Perempuan
6	Suranta	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Wilayah V

7	Heri Yulianta	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Wilayah III
---	---------------	--	-------------

3. Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) terdapat 6 (enam) lembaga yang wajib ada di Kalurahan, 5 (lima) lembaga dengan masa jabatan pengurusnya selama 6 (enam) tahun yaitu : LPMK, PKK, RW, RT dan LPMP dan 1 (satu) lembaga masa jabatan pengurusnya 3 (tiga) tahun yaitu Karang Taruna.

LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)

LPMK merupakan salah satu dari 6 lembaga wajib yang harus ada di Kalurahan yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain itu tugas LPMK ialah menggerakkan dan menggali partisipasi aktif serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kalurahan. Keanggotaan dan kepengurusan LPMK Nglanggeran adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sudiyono	Ketua	Nglanggeran wetan
2	Suroto	Wakil Ketua	Nglanggeran Kulon
3	Sukiran	Sekretaris	Gunungbutak
4	Sugita	Bendahara	Karamngsari
5	Tugiran	Koord.Sie. Prasarana Wilayah	Nglanggeran Wetan
6	Supriyono	Anggota	Gunungbutak
7	Sudarisman	Koord.Sie Perekonomian	Doga
8	Sudadi	Anggota	Nglanggeran Wetan
9	Suparmin	Koord.Sie Kamtib	Nglanggeran Kulon
10	Sakijan	Anggota	Gunungbutak
11	Tri Haryati	Sie Pemberdayaan Perempuan	Karangsari
12	Sumini	Anggota	Karangsari
13	Dwi Purwanto	Sie.Pemuda dan Olahraga Kesenian	Nglanggeran Kulon
14	Eka Prasetya	Anggota	Doga

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK Nglanggeran antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

2. Menggali swadaya murni masyarakat Kalurahan untuk mengimbangi bantuan.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbangkal.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kalurahan baik berupa kegiatan swakelola dan pembangunan swadaya murni masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Kalurahan .

PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Peran dan fungsi PKK dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan di pe Kalurahan an sangat penting. Sehingga kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan kaum laki-laki. Kegiatan PKK Kalurahan Nglanggeran selama ini melalui kegiatan PKK antara lain:

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan setiap tanggal 18.
- Posyandu di masing-masing pedukuhan.
- Pertemuan dengan kader rutin bulanan setiap tanggal 15.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Kursus kesetaraan gender.
 - Seminar penanggulangan KDRT.
 - UU Perlindungan anak.
 - Kursus ketrampilan

Kepengurusan PKK Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Lurah	Penanggungjawab	Nglanggeran
2	Tukiyah	Ketua	Doga
3	Supriyatun	Wakil Ketua	Ngl. Wetan
4	Rini Wahyuni	Sekretaris I	Gunungbutak
5	Eni Afriyani	Sekretaris II	Doga
6	Surini	Bendahara I	Ngl. Kulon
7	Rina Vitriani	Bendahara I	Doga
8	Lilis Suprapti	Koordinator Pokja I	Ngl. Wetan
9	Arletha Intan Maydareswari	Anggota	Doga
10	Warni	Anggota	Gunungbutak
11	Sugiyanti	Anggota	Karangsari
12	Sumini	Koordinator Pokja II	Karangsari
13	Tri Wahyuni	Anggota	Ngl. Kulon
14	Jumiyah	Anggota	Ngl. Kulon
15	Puji Lestari	Koordinator Pokja III	Doga
16	Yatiyem	Anggota	Ngl. Kulon
17	Ria Utami	Anggota	Karangsari
18	Toyibah	Anggota	Gunungbutak
19	Rina Sulistyawati	Koordinator Pokja IV	Karangsari
20	Anwarohman	Anggota	Doga
21	Maryati	Anggota	Doga
22	Samiyem	Anggota	Ngl. Wetan

KARANG TARUNA

Peran dan fungsi karangtaruna dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum remaja dan pemuda di pe Kalurahan an sangat penting. Sehingga kaum remaja sebagai generasi muda calon penerus bangsa harus memiliki kegiatan, semangat dalam rangka pemberdayaan khususnya generasi muda. Kegiatan karangtaruna Persada Kalurahan Nglanggeran selama ini antara lain :

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan .
- Mengadakan pertemuan dengan karangtaruna sub Padukuhan.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Pembinaan tentang bahaya narkoba
 - Pelatihan dan pendampingan TPA
 - Pendampingan dan Literasi
 - Pembinaan tentang hukum.

Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan Nglanggeran Periode 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Lilik Suharyanto	Ketua	Gunungbutak
2	Wahyu Eka Saputra	Wakil Ketua	Karangsari
3	Agesta Rori A	Sekretaris	Karangsari
4	Amarsila Mahardika Hutama	Wakil Sekretaris	Ngl. Kulon
5	Arum Devita Sari	Bendahara	
6		Wakil Bendahara	
7	Toni Ristianto	Seksi Kesenian	Karangsari
8	Vikram Aqila	Anggota	
9	Fajar Rahino	Anggota	Nglanggeran Kulon
10	Danang Yudana	Anggota	Karangsari
11	Muhammad Fauzi	Anggota	Nglanggeran Wetan
12	Fajar Rasyid M	Seksi Pendidikan	Doga
13	Ardi Priambudi	Anggota	Karangsari
14	Hana Safitri	Anggota	Nglanggeran Wetan
15	Aprilia Siti Adha	Anggota	Gunungbutak
16	Elsa Beni W	Seksi Olahraga	Karangsari
17	Idam Nur Said	Anggota	Nglanggeran Kulon
18	Tauhid Fajar Sulthoni	Seksi Kerohanian	Nglanggeran Wetan
19	Ririn Kusyani	Anggota	Gunungbutak
20	Wahyuda	Anggota	Doga
21	Aris Budiyo	Seksi Humas	Nglanggeran Kulon
22	Bayu	Anggota	Doga
23	Haryono	Anggota	Nglanggeran

			Wetan
24	Arista	Anggota	Gunungbutak
25	Triwantoro	Seksi Publikasi	Nglanggeran Kulon
26	Gandi Prabowo	Anggota	Nglanggeran wetan
28	Tommy Nur Cahyo	Anggota	Nglanggeran Kulon
29	Putra Rama Riski	Anggota	Doga
30	Anisa Cindy	Anggota	Karang Sari
31	Triyana	Anggota	Nglanggeran Kulon
32	Toni Wibowo	Seksi Keamanan	Karang Sari
33	Sutrisno	Anggota	Doga
34	Dedik Widiyanto	Anggota	Nglanggeran Kulon
35	Faizal	Anggota	Nglanggeran Wetan
36	Riyanto	Anggota	Karang Sari

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

RW dan RT merupakan salah satu dari lembaga wajib yang harus ada di Kalurahan yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam pembinaan kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan wilayahnya serta penggerak swadaya dan gotong royong masyarakat.

Data personalia lembaga itu sebagai berikut :

Data RW dan RT Kalurahan Nglanggeran

No	Padukuhan	RT		RW	
		Nama	Ketua	Nama	Ketua
1	Karang Sari	Pariman	001	Mugiyono	001
		Sunardi	002		
		Zunaidi	003		
		Wagiyo	004		
		Esti Watimah	005		
		Subardi	006		
2	Doga	Lestari	007	Ahmad Nasrodin	002
		Poniyem	008		
		Wagiyatna	009		
		Suparno	010		
		Badri	011		
3	Nglanggeran Kulon	Gandung	012	Wagiman	003
		Sumadi	013		
		Paniran	014		
		Jumono	015		
4	Nglanggeran	Heru S	016	Sugiyanto	004

	Wetan	Ponijan Surisman Dedy Setiyawan	017 018 019		
5	Gunungbutak	Poniran Juari Anggoro Samilah Dalijan	020 021 022 023	Ngatimin	005

LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMD merupakan lembaga yang berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat Padukuhan.

Keanggotaan dan kepengurusan LPMP di Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Sajiman	Karangsari	Ketua
2	Jujur Wibowo	Doga	Ketua
3	Sumiran	Nglanggeran Kulon	Ketua
4	Supardi	Nglanggeran Wetan	Ketua
5	Supriyono	Gunungbutak	Ketua

4. Ketenagakerjaan

Dari seluruh jumlah penduduk Kalurahan Nglanggeran yang berjumlah 3.709 jiwa, yang usia produktif (15-56 tahun) berjumlah 1.737 jiwa atau 47% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	1594 orang
2	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun yang bekerja	1350 orang
3	Jumlah penduduk usia 15-56 thn yang tdk bekerja	244 orang
4	Penddk wanita usia 18-56 thn menjd ibu rmh tangga	732 orang
5	Penduduk >15 tahun cacat sehingga tidak dapt bekerja	8 orang
6	Penduduk >15 tahun cacat dan bekerja	3 orang
7	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
	1) PNS	28 orang
	2) TNI/Polri	4 orang
	3) Kepala Kalurahan / Perangkat Kalurahan	1 orang
	4) Petani/ Pekebun	796 orang
	5) Swasta	463 orang

5. Pendidikan

Perkiraan tentang angka penduduk Kalurahan Nglanggeran yang telah berhasil mengenyam/lulus pendidikan sekolah formal hingga tahun 2021 ialah sebagai berikut :

No	Padukuhan	Buta Huruf	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D I	D II	D III	S 1	S 2	Jumlah
1	Karangsari	89	65	154	152	204	6	0	4	25		670
2	Doga	85	51	153	147	112	1	0	4	15		682
3	Nglanggeran Kulon	132	46	125	102	82	4	0	8	6		476
4	Nglanggeran Wetan	116	35	99	96	76	3	0	1	7		404
5	Gunungbutak	143	38	119	99	108	0	0	2	3		427
	JUMLAH	565	235	650	596	582	14	0	19	56		

Prasarana pendidikan yang ada di Kalurahan Nglanggeran terdiri dari PAUD jumlah 2, Taman Kanak-kanak (TK/RA) jumlah 3, Sekolah Dasar (SD) jumlah 2, Madrasah Ibtidiyah (MI) jumlah 1.

6. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat Kalurahan Nglanggeran dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya kesehatan masyarakat. Data tentang kesehatan masyarakat Kalurahan Nglanggeran antara lain sebagai berikut :

No	Indikator Kesehatan	Angka
1	Kematian bayi	Tidak ada
2	Kematian kasar	Tidak ada
3	Penderita Anemia ibu hamil	Tidak ada
4	Penderita Anemia balita	Tidak ada
5	Penderita kurang energi kronis	Tidak ada
6	Status gizi masyarakat di Kalurahan	Cukup

7. Peribadatan

Dari jumlah penduduk Kalurahan Nglanggeran berjumlah 2.709 jiwa semua beragama Islam 2659 Orang, beragama Kristen 10 Orang dan yang beragama Katholik 49 Orang, data prasarana ibadah yang ada dengan rincian sebagai berikut :

No	Prasarana Ibadah/Masjid	Alamat	Ketua Takmir
	Masjid		
1	Masjid Al Mu'minin	Karangsari	Sigit Purnomo
2	Masjid Al Baqo	Karangsari	Rubiman
3	Masjid Baitul Makmur	Karangsari	Risyanto
4	Masjid Darussalam	Doga	Sadimin
5	Masjid Al Ikhlas	Nglanggeran Kulon	Teguh Minardi
6	Masjid Al Barokah	Nglanggeran	Subali

		Wetan	
7	Masjid Jabal Qodim	Nglanggeran Wetan	Khoiri
8	Masjid Al Fatonah	Gunungbutak	Subardi
	KAPEL		
9	Kapel Santa Maria (Katholik)	Doga	Al Tupar
	MUSHOLA		
1	Mushola Darul Iman	Doga	Hartoyo
2	Mushola Rt 8	Doga	Lasiran
3	Mushola Rt 7	Doga	Lestari
4	Mushola Al Ilhamiyah	Nglanggeran Kulon	Warto
5	Mushola Kampung pitu	Nglanggeran Wetan	Tri Winardi
6	Mushola Jambon	Nglanggeran Wetan	Subali
7	Mushola An Nur	Gunungbutak	Sukiran

D. Prasarana dan Sarana Kalurahan

1. Transportasi, Jalan, Jembatan

Prasarana Transportasi yang ada di Kalurahan Nglanggeran jalan Kabupaten dan jalan Kalurahan serta jalan Padukuhan (lingkungan) yang menghubungkan antara Kalurahan Patuk, Terbah, Nglanggeran serta jalan antar Padukuhan di Wilayah Kalurahan Nglanggeran, dan panjang jalan Kabupaten kurang lebih 8 km dan panjang jalan Kalurahan 20,672 km aspal kurang lebih 9,791 km, panjang jalan rabat kurang lebih 16,767 km, panjang jalan perkerasan batu kurang lebih 1,200 km serta panjang jalan tanah kurang lebih 2,914 km.

2. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan yaitu :

Lurah sebagai pimpinan, dibantu Pamong Kalurahan yang terdiri :

1. Sekretariat yang dikepalai Carik , yang membawahi :

- 1) Urusan Tata Laksana;
- 2) Urusan Danarta;
- 3) Urusan Pangripto;

2. Pelaksana teknis yang terdiri dari :

- 1) Jogoboyo;
- 2) Ulu-ulu;
- 3) Kamituwo;

3. Unsur Wilayah terdiri dari : Dukuh

4. Staf Pamong Kalurahan .

3. Sarana Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan di Kalurahan Nglanggeran telah terbentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap Padukuhan

yang siap setiap saat dapat memberikan informasi dan Pos Kesehatan Kalurahan (Poskesdes) yang selalu siap dalam melayani/membantu masyarakat serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

BAB III VISI DAN MISI

A. Filosofi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki pandangan luas dan dapat menjadi pedoman dan tujuan bagi Kalurahan dalam menetapkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan.

Filosofi pembangunan Kalurahan Nglanggeran merangkum filosofi daerah Kabupaten Gunungkidul yang digali dari khasanah budaya luhur bangsa Indonesia, yaitu DHAKSINARGA BHUMIKARTA. *Dhaksinarga* berasal dari kata-kata *Dhaksina* yang berarti "Selatan" dan *Arga* yang berarti "Gunung", yang kemudian dirangkai menjadi satu kata *Dhaksinarga* yang artinya Gunungkidul. *Bhumikarta* berasal dari kata-kata *Bhumi* yang bermakna "bumi, tanah, daerah" dan *Karta* yang bermakna "Subur, makmur, rahayu, damai dan sejahtera".

Dengan demikian filosofi pembangunan Kabupaen Gunungkidul, DHAKSINARGA BUMIKARTA, merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan Hasta Dharma.

Adapun Hasta Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

- (1) Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan aliran dan agama,
- (2) Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum,
- (3) Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin,
- (4) Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif dan korektif,
- (5) Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju kearah kesejahteraan masyarakat,
- (6) Bersifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana agar dapat menampung dan mencari penjelasan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari,
- (7) Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dan
- (8) Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil, dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan di dalam kebaikan lahir, batin bagi masyarakat.

B. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan

dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM- KALURAHAN) NGLANGGERAN Tahun 2022-2027 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Nglanggeran **2021** yang telah diperbarui, yaitu :

GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA MANDIRI YANG JUJUR, ADIL SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA

Penjelasan Visi

“Gotong Royong” adalah Memasyarakatkan Gotong Royong dalam membangun SDM dan SDA Kalurahan Nglanggeran, dengan melibatkan langsung Masyarakat dalam Kegiatan Pemerintah Kalurahan baik bidang Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat maupun Pembangunan Lainnya.

“Membangun Desa Mandiri” adalah Menampung, menginventaris kegiatan pembangunan Kalurahan yang bermuara dari basis masyarakat yang dimuat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Apbdes Kalurahan dan atau RKP, agar pembangunan tepat sasaran dan efektif, dalam merealisasikan pelayanan Administrasi kita wujudkan Layanan on-line untuk membercepat layanan pada masyarakat.

“Jujur adalah Jujur dalam pelaksanaan pemerintahan Kalurahan dengan maksud membentuk Tim Pemantau dari masyarakat mau pun tokoh agar pemerintahan Kalurahan kedepan bisa berjalan dengan baik berkualitas dan tidak menjadi kan masalah di masyarakat maupun Pemerintah

“ Adil” adalah adalah dimana semua warga mendapat hak sesuai kewajibanya, dan pemerintah desa berpihak dan berpegang teguh pada kebenaran dan tidak sewenang-sewenang.

“Sejahtera” adalah menuju masyarakat yang lebih baik, dimana kondisi warga dan orang-orang didalamnya dalam kondisi makmur, sehat, damai, aman dan sejahtera

“Berbudaya dan Berakhlak Mulia’ adalah Memfasilitasi dan memasyarakatkan kegiatan agama di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan memiliki akhlaq yang baik untuk memajukan pembangunan SDM di Kalurahan Nglanggeran

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradaban yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Nglanggeran yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan Kalurahan yang mencapai tingkat peradaban lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

C. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi Kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan **2022 – 2027** yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan se hari – hari baik dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa
3. Meningkatkan Profesional dan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang memadai
5. Mewujudkan Perekonomian Desa dan kesejahteraan Masyarakat Desa
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat Desa yang maksimal
7. Meningkatkan kehidupan Desa secara Dinamis dalaman segi keagamaan dan Kebudayaan

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kedua (1)

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan Kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah Kalurahan dengan kelembagaan Kalurahan yang ada.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat Selalu mengedepankan Musyawarah dengan melibatkan masyarakat, dalam segala kegiatan Kalurahan melalui perdes maupun perkades, sehingga terwujudnya Kalurahan yang maju dan Transparan, sehingga Apararat Pemerintah Kalurahan tidak memiliki sedikit pun untuk berlaku curang.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat Kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kopentesi SDM Perangkat Kalurahan dalam melaksnakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistim keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Kalurahan sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam)

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fsilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar

masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi KeTujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Nglanggeran untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Nglanggeran sebagai berikut :

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pemerintahan Kalurahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat	Mewujudkan lingkungan pemerintahan Kalurahan yang harmonis dan dapat dipercaya
2	Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat	Mewujudkan tali silaturahmi yang kuat antara pemerintahan Kalurahan dengan masyarakat
3	Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat Kalurahan	Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur
4	Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai	Menciptakan Kalurahan dengan fasilitas yang lengkap yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat
5	Mewujudkan perekonomian Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan	Menciptakan program yang mengangkat potensi lokal sebagai daya dukung ekonomi masyarakat
6	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan yang maksimal	menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan secara mental
7	Meningkatkan kerukunan warga Kalurahan secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan	Menciptakan masyarakat yang kuat dari sisi agama dan memegang teguh warisan budaya

BAB IV
POTENSI, MASALAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Gambaran umum kondisi Kalurahan Nglanggeran berdasarkan hasil pengkajian Kalurahan secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi-potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kalurahan Nglanggeran. Adapun program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Nglanggeran.

A. Potensi

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun manusia secara umum yang ada di Kalurahan Nglanggeran adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kalurahan Nglanggeran 762,80 ha. Jumlah Penduduk tahun **2021** sejumlah 2.709 jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 59 th) berjumlah 44,79 % (1.871) yang merupakan potensi tenaga kerja.
2. Potensi pertanian termasuk di dalamnya peternakan, perikanan darat dan perkebunan.
3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan kayu serta pengolahan hasil pertanian yang berbentuk makanan olahan.
4. Letak wilayah yang sangat indah untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.
5. Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan hidup hemat.

Disamping itu hasil pengkajian Kalurahan secara partisipatif menunjukkan informasi tentang potensi-potensi Kalurahan Nglanggeran yang lebih rinci sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN POTENSI
1. Transaksi/Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padukuhan Karang Sari, Doga, Ngl. Kulon, Ngl. Wetan, Gunungbutak terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-haridan untuk pertanian. 2. Di lima padukuhan tersebut sebagian sawahnya masih dapat ditanami 2 kali dalam satu tahun. 3. Dan sebagian besar masih menggunakan sistem tadah hujan dan irigasi. 4. Disamping itu para petani menanam rumput kolonjono/gajah di galengan untuk pakan ternak dan pada musim kemarau sawah-sawah sebagian besar ditanami sayur-sayuran bagi yang dekat dengan sumber air.. 5. Untuk ladang/tegalan dimanfaatkan para

	<p>petani untuk ditanami ketela dan palawija yang sesuai dengan keadaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dilingkungan rumah pekarangan ditanami kakao dan buah - buahan yang hasilnya cukup memuaskan para petani. 7. Kalurahan Nglanggeran juga ada hutan rakyat yang dimiliki oleh individu yang ditanami pohon jati, sengon laut, sono keling, akasia, jambu mete juga terdapat beberapa hewan. 8. Hasil dari hutan rakyat tersebut di gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari serta dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan kayu bakar. 9. Jalan yang menghubungkan antar padukuhan sebagian besar telah diperkeras (aspal, rabat beton dan batu). Namun pada saat ini jalan aspal kebanyakan sudah rusak yang perlu rehab. 10. Pada musim kemarau sebagian masyarakat menggunakan sumber mata air khususnya di 5 padukuhan padukuhan kebanyakan membeli untuk kebutuhan sehari-hari; tahun 2014 padukuhan karangsari dibangun sumur burkemudian disusul di padukuhan Doga yang juga dibangun sumur bur dalam, sedangkan 3 padukuhan masih menggunakan sumber mata air (sendang dan sumur galian)sekarang kebutuhan akan air hampir 40 % tercukupi dan pada saat sekarang masih dalam upaya memaksimalkan pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat Nglanggeran 11. Sebagian besar penduduk Kalurahan Nglanggeran bermata pencaharian sebagai petani yang sebagian kecil sebagai buruh tani dan bangunan, pedagang arang dan kayu bakar, buruh harian lepas, karyawan swasta, wira swasta,PNS, TNI/POLRI Tingkat pendidikan warga Kalurahan Nglanggeran kebanyakan adalah SLTP sampai S1. 12. Disamping pertanian, sebagian penduduk beternak sapi, kambing, ayam,Gemak,magot dan lain sebagainya. 13. Prasarana pendidikan formal adalah 2 SD Negeri yaitu SD N Doga dan SD N Nglanggeran. 3 TK/RA dan 2 PAUD
--	--

2. Kalender Musim	<p><i>Musim Kemarau (bulan Juni – Oktober)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan pupuk kandang (kompos) 2. Petani membuat arang untuk kebutuhan sehari-hari 3. Tenaga kerja keluar daerah untuk menambah penghasilan 4. Petani menjual kayu bakar 5. Petani menjual hasil bumi seperti ketela dan pisang 6. Petani menjual sayur-sayuran 7. Petani menjual buah-buahan dsb. <p><i>Musim Penghujan (bulan November – Mei)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan lahan pertanian 2. Petani mulai menanam jagung, kacang, ketela dan padi 3. Petani mulai pemupukan tanaman pertanian 4. Petani menuai hasil pertaniannya 5. Petani menyetok hasil pertaniannya. 6. Buruh tani berkonsentrasi dalam mengerjakan pertaniannya.
3. Peta Sketsa Kalurahan	<p><i>Padukuhan Karangsari</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air berasal dari sumur gali dan PAM 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, kelengkeng, mangga dan durian, Pisang dll 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur, sere, temu ireng, dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam, lele, . 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata Pencaharian kebanyakan petani dan ada pedagang, PNS, wiraswasta, dan buruh harian lepas. 8. Jumlah Penduduk : 773 jiwa dan terdiri dari 252 KK. <p><i>Padukuhan Doga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan sumur gali dan PAM 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, durian, mangga, pisang, alpukat, kelapa & petai

4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing, ayam, lele, burung puyuh, magot
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian kebanyakan adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada Polri dan wiraswasta,PNS juga buruh harian lepas.
8. Jumlah Penduduk : 597 jiwa dan terdiri dari 159 KK

Padukuhan Nglanggeran Kulon

1. Sumber air dari sumber mata air PAM dan mata air,sumur gali
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat Durian Kelengkeng Alpukat, durian, rambutan & pisang
4. Tanaman obat keluarga/empon-empon Ss(jahe, kunyit, lengkuas dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing, ayam,puyuh petelur,lele
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian kebanyakan petani, sebagian kecil pedagang dan ada TNI dll
8. Jumlah Penduduk : 477 jiwa dan terdiri dari 142 KK

Padukuhan Nglanggeran Wetan

1. Sumber air dari sumber mata air, sumur gali, sumber mata air dan PAM
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
2. Buah-buahan terdapat rambutan, kelengkeng, durian, pisang, alpukat dll
3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)
4. Peternakan terdapat peternakan s sapi dan kambing, ayam,Burung,lele .
5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
6. Mata pencaharian adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada Polri dan wiraswasta,PNS juga buruh harian lepas. Jumlah Penduduk : 397 jiwa dan terdiri dari 221 KK

Padukuhan Gunungbutak

1. Sumber mata air dari belik dan PAM
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman

	<p>keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)</p> <p>3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian, alpukat</p> <p>4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)</p> <p>5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam ras, magot</p> <p>6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang</p> <p>7. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang</p> <p>8. Jumlah Penduduk : 486 jiwa dan terdiri dari 145 KK</p>
4. Bagan Kelembagaan	<p>1. KALURAHAN Nglanggeran organisasi/lembaga yang aktif dan mempunyai peran terhadap masyarakat adalah RT/RW, LPMP, LPMD, PKK, Karang Taruna, LINMAS beserta Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.</p>

B. Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran yang perlu ditangani segera adalah sebagai berikut :

1. Dari 326 Keluarga Pra KS dan KS I yang perlu penanganan serius untuk pengentasan kemiskinan.
2. Lahan persawahan yang menggantungkan pada curah hujan.
3. Pakan ternak yang pada musim kemarau sangat sulit perlu ada solusi atau pembuatan pakan ternak.
4. Perikanan darat juga perlu adanya pemecahan untuk meningkatnya budi daya ikan dan pembuatan pakan ikan.
5. Tingkat Pendidikan yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarana serta penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.
6. Prasarana infrastruktur terutama jalan-jalan yang masih banyak yang rusak perlu bantuan dan penanganan yang segera dilakukan.
7. Pertanahan yang masih banyak belum bersertifikat sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya pensertifikatan dan pensertifikatan tanah milik desa.
8. Kamtibmas perlu adanya penanganan, terutama LINMAS yang kemampuannya kurang maksimal/ profesional.
9. Perumahan desa menanti di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan untuk wisata
10. Spal komunal Nglanggeran Wetan perlu penanganan dan evaluasi terkait dengan pencemaran udara yang di timbulkan
11. Banyaknya bahan baku paska panen yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal
12. Sampah rumah tangga yang semakin hari semakin sulit ter tangani, karena pola hidup masyarakat yang semakin banyak bergantung

pada produk yang sulit untuk di daur ulang dan kesadaran menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rendah.

13. Masih banyak aset desa yang belum dimanfaatkan secara optimal baik berupa tanah kas desa, SG dan pengembangan wisata
14. Sarana olah raga dan gedung serba guna mendesak segera dibangun.
15. Pembangunan tugu selamat datang masih terkendala masalah pembebasan tanah.
16. Penegakan sanksi Perdes perlindungan satwa liar belum maksimal
17. Belum maksimal wadah/ tempat pemasaran produk lokal skala desa/ pasar tiban
18. Peningkatan SDM pemerintah desa dan lembaga sesuai teknologi modern

Disamping itu hasil pengkajian Kalurahan secara partisipatif menunjukkan informasi tentang masalah-masalah yang ada di Wilayah Kalurahan Nglanggeran dengan rincian sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN MASALAH
1. Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih hampir disemua padukuhan pada musim kemarau sebagian kecil warga yang kurang, sehingga harus beli/minta bantuan. 2. Sebagian besar lahan Persawahan di musim kemarau kebanyakan kering tidak dapat ditanami karena tidak ada irigasi dan sungai kering. 3. Kesuburan tanah sawah maupun ladang menurun setelah petani menggunakan pupuk kimia. 4. Hama tanaman seperti tikus, wereng, walang, sundep dan ulat menjadi tantangan para petani. 5. Hutan rakyat juga banyak kendala dengan adanya hama seperti ulat, tupai, jamur kayu beracun (tajin, upas, dipo). 6. Peternakan juga banyak tantangan karena hama <i>ND (newcastle Disease)</i> (mulut berair) bagi peternak ayam. 7. Sebagian kecil Jalan-jalan aspal ditiap padukuhan banyak yang sudah rusak. 8. Pemasaran hasil pertanian mengalami kendala karena harus menjual kepasar di luar kabupaten. Peternakan ayam ras juga menimbulkan masalah karena mengakibatkan bau yang tidak sedap juga lalat. 9. Batas tanah banyak masalah karena belum semuanya disertifikat.
2. Peta Sketsa Kalurahan	<p><i>Padukuhan Karang Sari</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim

	<p>kemarau</p> <p>6. SDM rendah</p> <p><i>Padukuhan Doga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sawah kebanyakan kering pada musim kemarau 2. Tanah berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. SDM rendah 6. Kurangnya sumber pakan ternak pada musim kemarau 7. Mahalnya pupuk pabrik di masa tanam 8. Berkurangnya debit air pada sumur bur ketika terjadi kemarau panjang 9. Ancaman tanah longsor <p><i>Padukuhan Nglanggeran Kulon</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanahnya berbukit 2. Banyak batu-batu besar 3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah 6. Ancaman tanah longsor <p><i>Padukuhan Nglanggeran Wetan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor <p><i>Padukuhan Gunungbutak</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor
<p>3. Kalender Musim</p>	<p><i>Musim Kemarau (bulan Juni - Oktober)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan air 2. Harga jual ketela rendah 3. Kekurangan pakan ternak 4. Harga jual ternak murah 5. Harga jual buah-buahan murah dsb.

	<p><i>Musim Penghujan (bulan November – Mei)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga benih mahal 2. Pupuk sulit didapat dan harganya mahal 3. Penjualan hasil pertanian murah 4. Sulit mengeringkan hasil panen 5. Transportasi hasil panen sulit
4. Bagan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAMUSKAL sudah berperan aktif dalam menjalankan tugas 2. Karang Taruna tingkat Kalurahan belum optimal dalam perannya sebagai wadah generasi muda. 3. Keberadaan LPMD dan LPMP sudah berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 4. RW dirasakan tidak ada fungsinya karena perannya sama dengan Dukuh. 5. RT sudah sangat berperan aktif sesuai dengan tupoksinya

Peluang yang sangat besar untuk mengurangi permasalahan di Kalurahan Nglanggeran adalah :

1. Peran serta masyarakat dan kesadarannya dalam bergotong-royong dan berswadaya masih tinggi sehingga dalam melaksanakan pembangunan di tingkat RT, Padukuhan maupun Kalurahan sangat baik.
2. Kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dengan lembaga yang ada cukup harmonis.
3. Partisipasi Perusahaan yang ada di Wilayah Kalurahan Nglanggeran cukup mendukung dalam melaksanakan program pembangunan.

C. Strategi

Strategi merupakan tujuan umum, sasaran dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta berpikir yang melatar belakangi upaya-upaya pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengedepankan potensi.

Berdasarkan Misi dan Tujuan di atas, strategi-strategi RPJM-KALURAHAN Nglanggeran berikut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kemampuan Kalurahan , serta memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat maupun pihak-pihak lain yang berkomitmen terhadap pembangunan Kalurahan NGLANGGERAN.

Berikut adalah penjabaran Tujuan menjadi Strategi-strategi Pembangunan :

TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
A	MISI KESATU	STRATEGI
1	Mewujudkan Pemerintahan Kalurahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat	Mengoptimalkan sistem pemerintahan Kalurahan yang lebih transparan kepada masyarakat

B	MISI KEDUA	
1	Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat	Mengoptimalkan sistem komunikasi antara pemerintahan Kalurahan dan masyarakat
C	MISI KETIGA	
1	Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat Kalurahan	Mengoptimalkan kinerja perangkat Kalurahan dalam hal bekerja dan melayani masyarakat
D	MISI KEEMPAT	
	Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai	Menambah dan memperbaiki fasilitas Kalurahan untuk berjalan lancarnya kegiatan masyarakat

E	MISI KELIMA	
	Mewujudkan perekonomian Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan	Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk usaha mandiri atau home industry
F	MISI KEENAM	
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan yang maksimal	Menyediakan tenaga kesehatan yang memadai dan profesional.
2		
G	MISI KETUJU	
1	Meningkatkan kerukunan warga Kalurahan secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan	Menggalakan program keagamaan yang rutin dan acara kesenian khas daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan adalah upaya Pemerintah Kalurahan dalam peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Kalurahan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan, serta menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam membangun.

A. Arah Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Sumber-sumber penerimaan Kalurahan terdiri dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAD), pendapatan transfer berupa Dana Kalurahan dropping APBN, Alokasi Dana Kalurahan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Propinsi, serta Pendapatan Lain-lain berupa bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Kalurahan, bunga bank, hadiah lomba lunas PBB, hadiah lomba dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dana Kalurahan dropping APBN adalah penerimaan dari pemerintah pusat yang penggunaannya 100% hanya digunakan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan penyertaan modal Kalurahan yang mulai tahun **2021** penggunaan dana tersebut dengan semangat/sistem Padat Karya Tunai di Kalurahan (PKTD).

Pengelolaan penerimaan Kalurahan dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel, dalam rangka peningkatan penerimaan Kalurahan perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan Kalurahan. Apabila pengelolaan penerimaan dan pembelanjaan tidak dilakukan secara transparan, maka akan menimbulkan masalah hukum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembangunan Kalurahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat masih memerlukan anggaran ADD, Bantuan Pemerintah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Kalurahan belum optimal karena usaha-usaha Kalurahan dan pengelolaan asset belum dilaksanakan secara maksimal, walaupun dari Pemerintah Kalurahan sudah berupaya mencari trobosan agar PAD lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya..

Pendapatan lain-lain pada setiap tahun hampir sama bahkan cenderung tidak stabil karena tergantung dari situasi dan keadaan perusahaan yang ada serta semangat pemerintah Kalurahan dan masyarakat untuk berprestasi dalam perlombaan yang ada dan diikuti, terutama kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Alokasi Dana Kalurahan (ADD) adalah bagian dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan penggunaan ADD di Kalurahan Nglanggeran adalah sebagian besar untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian kecil untuk membiayai Pembangunan fisik.

B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

Sesuai dengan adanya otonomi daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan telah diberi peluang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Kalurahan merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran Kalurahan periode tahun anggaran tertentu. Pengalokasian Belanja Pembangunan Kalurahan dilaksanakan antara lain dengan acuan/rumusan program-program pembangunan hasil MUSRENBANGDES, hasil rumusan dari aspirasi masyarakat dan Arah Kebijakan Pembangunan. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusun strategi maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu enam tahun masa jabatan Kepala Kalurahan . Kebijakan merupakan rumusan keputusan yang digunakan untuk :

- (1) Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan
- (2) Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- (3) Menciptakan kondisi dimana setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya yang mendapat dukungan untuk mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan Nglanggeran, maka kebijakan-kebijakan pembangunan Kalurahan Nglanggeran tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

STRATEGI-KEBIJAKAN

A	MISI KESATU	
NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Pemerintahan Kalurahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat	Mengembangkan profesionalitas dan keterampilan perangkat dalam pengelolaan administrasi
B	MISI KEDUA	
1	Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat	Memberikan akses ruang terbuka (pendopo kelurahan, pos ronda, pekarangan) sebagai sarana diskusi dan musyawarah warga masyarakat
C	MISI KETIGA	
1	Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat Kalurahan	Melakukan pemantauan terhadap kinerja seluruh perangkat Kalurahan dan mengembangkan ketrampilan perangkat Kalurahan
D	MISI KEEMPAT	

1	Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai	Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap sarana prasarana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki
E	MISI KELIMA	
1	Mewujudkan perekonomian Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan	Mengalokasi dana desa untuk mendukung perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan sumber pendapatan Kalurahan
F	`	
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan yang maksimal	Mengoptimalkan pusat pelayanan terpadu dan unit kesehatan masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan dari Kalurahan dan jajarannya
G	MISI KETUJUH	
1	Meningkatkan kerukunan warga Kalurahan secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan	1. Membuat payung hukum untuk cagar budaya yang perlu dilestarikan 2. Melakukan repitalisasi daerah wisata maupun peninggalan sejarah

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut melalui program-program yang sudah direncanakan untuk meneruskan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan demikian program kegiatan merupakan suatu jenis rencana yang disusun secara lebih konkret dan terkandung berbagai jenis kegiatan untuk menuju misi yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan Nglanggeran tahun 2022-2027 yang merupakan penerjemahan dari Visi, Misi, Tujuan Strategi, dan Kebijakan pembangunan di atas dirumuskan dalam bentuk pembedaan seperti disajikan pada tabel berikut :

BAB VII PENUTUP

A. Program

RPJM- Kalurahan ini memuat arah kebijakan keuangan Kalurahan, strategi pembangunan Kalurahan, kebijakan umum dan program pelayanan terhadap masyarakat serta RPJM- Kalurahan ini juga merupakan arah kebijakan pembangunan Kalurahan. Perencanaan pembangunan Kalurahan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas kegunaan dengan tidak mengesampingkan aspirasi dari masyarakat dan kesinambungan program, sehingga diharapkan RPJM- Kalurahan ini juga memuat hal-hal yang menjadi rencana/program sebagai pedoman pembangunan selanjutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tahap-tahap penyusunan RPJM- Kalurahan ini berlangsung selama tiga bulan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Rancangan RPJM- Kalurahan dapat diajukan oleh Pemerintahan Kalurahan.
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM- Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan harus membentuk tim penyusun RPJM- Kalurahan.
- 3) Pengkajian keadaan Kalurahan dan penyiapan Gambaran awal seperti Visi dan Misi Kalurahan dalam pembangunan;
- 4) Penggalan usulan/gagasan program-program pembangunan di masing-masing Padukuhan melalui musyawarah padukuhan (Musdus) yang dihadiri oleh Dukuh, perangkat padukuhan, serta masing-masing perwakilan utusan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan di tingkat padukuhan;
- 5) Dalam menyusun rancangan RPJM- Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat termasuk pengkajian isu-isu potensi dan masalah Kalurahan, termasuk ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
- 6) Penyusunan rancangan RPJM- Kalurahan dengan menyelaraskan arah kebijakan pemerintah Kalurahan, pengkajian keadaan Kalurahan dan pembahasan serta pengolahan hasil penggalan gagasan dilaksanakan melalui Musyawarah Kalurahan (Musdes).
- 7) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangdes);
- 8) Penyajian naskah rancangan RPJM- Kalurahan untuk dibahas dalam Musyawarah **BAMUSKAL** pada tahap awal;
- 9) Setelah dilakukan Musrenbang- Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8)), maka Pemerintahan Kalurahan menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh **BAMUSKAL** dan Pemerintah Kalurahan dalam acara penetapan persetujuan **BAMUSKAL** atas rancangan RPJM- Kalurahan menjadi RPJM- Kalurahan yang dituangkan dalam Peraturan Kalurahan.
- 10) Setelah mendapat persetujuan **BAMUSKAL** pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diatas, maka Lurah menetapkan RPJM- Kalurahan serta memerintahkan Sekretaris

Kalurahan atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Kalurahan .

Selanjutnya RPJM- Kalurahan yang telah ditetapkan dan diundangkan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan di Kalurahan Ngoro-oro selama 6 (enam) tahun ke depan melalui program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kalurahan).